

Pembaca yang budiman, beberapa waktu terakhir ini kita memperingati beberapa peristiwa penting, seperti peringatan Bom Marriott I yang ke-11 pada 9 Agustus lalu. Begitu juga peringatan 1 Dekade Bom Kuningan pada 9 September lalu dan Peringatan Bom Bali yang ke-12 pada bulan Oktober.

Apa pun bentuknya, sebuah tragedi tidak akan pernah terlupakan, apalagi tragedi bom yang memiliki imbas multidimensi.

Pada bulan September yang lalu, Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban (disebut juga UU LPSK) telah direvisi.

Dalam edisi kali ini, *Suara Perdamaian* akan mengulas tentang UU LPSK yang baru tersebut. Kendati masih ada kekurangan, namun UU ini sudah mencakup beberapa hak korban bom terorisme seperti hak restitusi, hak kompensasi, hak layanan medis dan lainnya.

Suara Perdamaian mengundang teman-teman dari komunitas korban bom dan penyintas untuk berkontribusi dalam bentuk tulisan, baik berupa renungan, puisi, analisa, kolom dan lain sebagainya. Di edisi kali ini, Ibu Hayati Eka Laksmi menuliskan artikel tentang proses memaafkan.

Juga menarik untuk dibaca, wawancara redaksi dengan Bapak Solahudin, ahli terorisme dan konflik sosial dari Universitas Indonesia (UI), yang juga salah satu anggota Dewan Pembina Aliansi Indonesia Damai (AIDA). Semoga edisi kali ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Selamat membaca dan sampai jumpa dalam edisi mendatang.

Juke Carolina
Redaksi

MAKLUMAT

Apabila ada kritik, saran, maupun keinginan untuk menerima newsletter ini secara berkala, silakan kirim nama Anda, nomor kontak, serta email/alamat rumah lengkap ke email redaksi di: sekretariat@aida.or.id atau via SMS hotline AIDA: 081219351485 & 085779242747.

Harapan Itu Bernama Revisi Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Foto Dokumentasi LPSK.

“Kami sangat mengharapkan adanya pendampingan dari Aliansi Indonesia Damai (AIDA) terkait proses Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena revisi UU ini akan menjamin hak-hak korban terorisme. Hingga kalau terjadi aksi terorisme (semoga tidak akan pernah terjadi lagi) para korban bisa langsung mendapatkan hak-hak mereka, khususnya hak layanan medis pada saat-saat baru terjadi sebuah ledakan bom.”

Demikian kurang lebih disampaikan oleh Sucipto Wibowo, salah satu korban Bom Kuningan tahun 2004, kepada teman-teman AIDA pada pertengahan bulan Juli lalu. Menurut Wakil Ketua Yayasan Penyintas itu, beberapa korban bom selama ini telah mengawal proses revisi UU, yang juga dikenal dengan sebutan UU LPSK, dan tak jarang berhadapan dengan lembaga pendamping dari korban aksi kekerasan lain seperti korban kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM). *“Bila korban aksi kekerasan lain mempunyai lembaga pendamping, korban terorisme juga bisa mempunyai lembaga pendamping, yaitu AIDA”*, ungkap Vivi Normasari, perwakilan korban yang selama ini aktif mengikuti berbagai macam pertemuan terkait proses

revisi UU di atas.

Bersama sejumlah pihak, AIDA terus mengikuti pertemuan demi pertemuan terkait dengan revisi UU ini. Baik pertemuan yang dilakukan oleh LPSK secara langsung ataupun lembaga-lembaga lain yang membahas tentang proses revisi ini.

Ketika mengkaji draft revisi UU LPSK, AIDA dan salah satu unsur perwakilan korban terorisme menemukan bahwa Pasal 6 dan 7 yang membahas tentang hak medis, hak rehabilitasi, dan hak kompensasi, kurang mengakomodir hak-hak korban bom dibandingkan dengan hak-hak para korban HAM berat.

Dalam rumusan awal, korban terorisme tidak mendapatkan semua hak-hak di atas seperti yang didapatkan korban HAM berat. Temuan ini telah

disampaikan kepada pihak LPSK dan telah ditindaklanjuti. Hingga revisi UU ini memberikan hak-hak yang sama kepada korban HAM berat dan korban terorisme. Ketentuan dalam pasal-pasal di atas telah disetujui oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI periode 2009-2014 dan sudah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Revisi UU ini bisa menjadi salah satu langkah menuju pemenuhan hak-hak korban yang selama ini masih sangat lemah. Dalam sambutan yang disampaikan pada acara Seminar Sehari untuk memperingati Hari Ulang Tahun LPSK yang ke-6 (25/8), Ketua Komisiner LPSK, Abdul Haris Semendawai, berjanji akan meningkatkan perhatian terhadap para korban aksi pelanggaran hukum, termasuk korban aksi terorisme. Masih menurut Abdul Haris, tantangan inilah yang menjadi inspirasi dalam penggunaan tema “Pengarutamaan Perspektif Korban dan Saksi dalam Hukum Pidana” pada perayaan ulang tahun LPSK tahun ini.

Dari pantauan redaksi,

proses revisi UU ini berjalan mulus hampir tanpa kendala berarti. Bahkan Menurut Jaksa Agung, Basrief Arief, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Surat Persetujuan atas revisi UU perubahan ini. Kini revisi UU LPSK secara resmi telah disahkan sebagai UU.

Perkembangan ini tentu sangat berarti dalam hal peningkatan perhatian dan pemenuhan hak-hak korban, khususnya korban terorisme. Namun perkembangan ini bukan akhir dari segalanya, justru masih banyak agenda yang harus terus dikawal bersama di masa-masa mendatang. Salah satunya adalah implementasi terhadap UU di atas sehingga para korban mendapatkan semua haknya. (HSB)

WAWANCARA



Doc. AIDA

Bapak Solahudin adalah seorang peneliti di *The Indonesian Strategic Policy Institute/CTSC-UI*, wartawan senior, penulis buku “NII sampai Ji: Salafi Jihadisme di Indonesia”, dan anggota Dewan Pembina Aliansi Indonesia Damai (AIDA).

Dalam edisi ini, *Suara Perdamaian* bercakap-cakap dengan beliau mengenai topik yang kini tengah ramai dibicarakan publik dan media massa, yaitu tentang Negara Islam di Suriah dan Irak, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Islamic State/Islamic State of Iraq and Syria (IS/ISIS)*. (Bersambung ke halaman 3)

Peringatan Bom Marriott I Ke-11

Beberapa bulan terakhir komunitas korban bom memperingati aksi terorisme, yaitu peringatan sebelas tahun Bom Marriott I dan peringatan Satu Dekade Bom Kuningan. Kedua acara peringatan dilaksanakan di Jakarta dan dihadiri oleh puluhan peserta dan keluarga korban.

Peringatan ke-11 Tragedi Bom Marriott I telah terlaksana dengan baik pada hari Sabtu, 9 Agustus 2014. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Penyintas (YP) dan didukung oleh Aliansi Indonesia Damai (AIDA), diselenggarakan di Restoran Phinisi di Jakarta dan dihadiri oleh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) undangan, dimana 25 (dua puluh lima) diantara mereka adalah korban langsung dan keluarga (suami, istri dan anak-anak) para korban meninggal dalam tragedi bom tersebut.

Acara diawali dengan registrasi dan pengisian data form korban, yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Panitia YP dan AIDA. Data form ini dibuat secara seragam untuk mendata dan memperbaharui data korban dari tiap-tiap tragedi bom di Indonesia. Informasi yang tercantum dalam data form ini akan digunakan untuk



Foto Komunitas korban Bom Marriott I dan perwakilan AIDA berfoto bersama pasca acara Peringatan 11 Tahun Bom Marriott I di Restoran Phinisi, Jakarta. Doc. AIDA

kepentingan pelaksanaan program yang didukung pemerintah (seperti LPSK) maupun oleh AIDA.

Melalui pembaharuan data ini, diharapkan bisa terdapat data-data Korban Bom di Indonesia secara lebih komprehensif dan akurat. Hingga bisa dijadikan rujukan dalam pengelolaan program-program pemberdayaan untuk korban bom.

Ibu Dwi Welasih sebagai Ketua YP (lembaga baru yang kini memayungi mayoritas korban dan penyintas di Indonesia), mengatakan bahwa para janda dan anak-anak dari para almarhum korban bom merupakan kelompok yang sering terlupakan. Melalui acara peringatan seperti ini, mereka dapat berjumpa dan saling bersilaturahmi. (JC)

Peringatan Satu Dekade Tragedi Bom Kuningan

Acara peringatan Satu Dekade Bom Kuningan berlangsung pada hari Selasa, 9 September lalu. Meski dengan waktu persiapan yang terbatas, peringatan terlaksana dengan amat baik, berkat kerjasama para anggota Yayasan Penyintas, AIDA, Asia PR, *Global Centre of Wellbeing* dan lainnya. Diharapkan acara peringatan ini menjadi momen penegasan transisi korban bom menjadi penyintas (*survivor*) dalam upaya membangun Indonesia Damai, khususnya dari aksi terorisme.

Peringatan ini berlangsung selama hampir satu hari penuh, di dua lokasi kegiatan, yaitu Jalan Rasuna Said di seberang Kedutaan Besar Australia, tepatnya di depan Plaza 89, dan di Hotel Royal Kuningan. Di depan Plaza 89, dilaksanakan aksi damai dengan cara membagikan setangkai bunga yang bersematkan serik kertas berisi pesan-pesan perdamaian



Foto Korban dan perwakilan BEM Perbanas melakukan aksi damai di ruas-ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat. Doc. AIDA

pada para pengguna jalan yang melintas. Puluhan orang dari pihak korban, keluarga korban, dan sejumlah mahasiswa/i Perbanas, melakukan aksi damai yang dimulai pada pukul 10:30 WIB.

Selanjutnya mereka bergabung dalam aksi simpatik menuju Hotel Royal Kuningan untuk mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD). Sejumlah rekan-rekan korban Bom Kuningan yang tidak sempat mengikuti Aksi Damai di Jalan Rasuna Said, turut bergabung dalam acara FGD tersebut. Acara ditutup dengan penampilan kejutan dari D'Massiv Band yang kerap memberikan perhatian dan peduli terhadap komunitas korban bom. D'Massiv membawakan

beberapa lagu dan mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari hadirin peserta FGD.

FGD menyetengahkan tema "Pemenuhan Hak dan Penguatan Peran Korban Bom", serta informasi seputar perkembangan gerakan radikalisme di Indonesia. Adapun pembicara dalam FGD tersebut antara lain: Nasir Abbas (Pengamat Terorisme), Arif Fahrudin Fahroe (MUI), Zora Sukabdi (Psikolog), dan Rakyana Adibrata (LPSK). Tercatat, 40 orang korban beserta keluarga dan para undangan menghadiri FGD tersebut, termasuk dari beberapa kedutaan besar negara sahabat, media dan aktivis. (JC)

DATA FORM KORBAN

Bagi teman-teman korban yang belum pernah/ingin mengisi Data Form korban, silahkan menghubungi AIDA pada sekretariat@aida.or.id, dengan mencantumkan nama lengkap, alamat tinggal, nomor kontak, dan e-mail (jika ada). Staf AIDA akan mengirimkan Data Form lewat pos atau e-mail.

Strategi *Soft Approach* Harapan Penyelesaian Akar Terorisme di Indonesia

Bapak Solahudin adalah seorang peneliti di *The Indonesian Strategic Policy Institute/CTSC-UI*, wartawan senior, penulis buku “*NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia*”, dan anggota Dewan Pembina Aliansi Indonesia Damai (AIDA). Dalam edisi ini, *Suara Perdamaian* bercakap-cakap dengan beliau mengenai topik yang kini tengah ramai dibicarakan publik dan media massa, yaitu tentang Negara Islam di Suriah dan Irak, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Islamic State/Islamic State of Iraq and Syria (IS/ISIS)*. Aktivitasnya sebagai peneliti juga mengharuskan beliau untuk berinteraksi dengan narapidana terorisme dan mantan pelaku kekerasan ekstrem yang telah menyesali perbuatan mereka dan menjalani masa hukuman. Berikut petikan wawancara *Suara Perdamaian* dengan beliau.

Dalam kurun dua bulan terakhir ini kita memperingati 11 tahun tragedi Bom Marriott I dan Satu Dekade Bom Kuningan. Seperti apakah situasi/kondisi terakhir kontra-terorisme di Indonesia?

Pemerintah Indonesia melakukan penanggulangan terorisme di Indonesia ini kan melalui dua strategi. Strategi *hard approach* melalui pendekatan penegakan hukum dan yang kedua strategi *soft approach* melalui pendekatan seperti deradikalisasi atau kontra-radikalisme. Strategi *hard approach* ini saya kira sangat berhasil.

Polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum berhasil menangkap hampir semua kasus terorisme di Indonesia yang terjadi pada kurun 2002 hingga sekarang. Hampir semua pelakunya berhasil ditangkap. Dari 2002 hingga 2013 lebih dari 900 orang tersangka teroris yang ditangkap. Namun sayangnya keberhasilan strategi *hard approach* ini belum dibarengi dengan keberhasilan *soft approach*. Padahal ini penting, soalnya pendekatan *soft approach* ini kan harapannya menyelesaikan akar masalah terorisme. Kalau akar masalah bisa diselesaikan, kita bisa berharap bahwa terorisme di Indonesia akan menurun signifikan. Namun menurut saya pendekatan *hard approach* melalui program deradikalisasi atau kontra-radikalisme belum maksimal.

Sebagai bukti, begitu banyak para tersangka teroris yang ditangkap bahkan ditembak mati, tapi kasus terorisme terus terjadi.



Foto thejakartapost.com

Bahkan dalam periode 2010-2013 sempat meningkat. Dalam hitungan saya selama periode itu ada lebih dari 85 kasus terorisme. Meningkatnya angka terorisme ini menunjukkan bahwa pendekatan *soft approach* masih belum berhasil dan perlu ditingkatkan.

Meski banyak pihak termasuk pemuka-pemuka Islam di dalam dan di luar negeri yang menentang IS, kehadiran mereka masih merisaukan. Apakah IS itu sebenarnya, ajaran mereka, dan apakah warga negara dan pemerintah Indonesia patut resah atas kehadiran kelompok ini?

IS (*Islamic State*) didirikan pada 1 Ramadhan 2014 sebagai transformasi dari ISIS (*Islamic State of Iraq and Syam* atau *Islamic State of Iraq and Suriah*) yang dideklarasikan pada April 2013. Sementara ISIS sendiri adalah transformasi dari ISI (*Islamic State of Iraq*). ISI yang didirikan pada 2006 oleh berbagai kelompok jihad di

Irak. Kemudian pada 2013 ISI masuk ke Suriah dan kemudian mendeklarasikan ISIS. Paham ajaran utama mereka adalah pentingnya penegakan sebuah Khilafah. Khilafah menjadi syarat bagi tegaknya syariat Islam.

Pasalnya syariat Islam itu terbagi jadi dua. Syariat yang bersifat individu seperti shalat, puasa, dan syariat Islam yang bersifat sosial seperti *hudud* (hukum pidana) dan lain-lain. Untuk bisa menegakan syariat

Pemerintah dan masyarakat Islam di Indonesia memang banyak yang cemas dengan kehadiran IS karena beberapa alasan. *Pertama*, IS/ISIS mendefinisikan diri sebagai khilafah atau pemerintah Islam sedunia yang saat ini menguasai beberapa wilayah di Suriah dan Irak. Tapi IS/ISIS punya agenda untuk meluaskan wilayahnya ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Jadi muncul kecemasan bahwa ISIS mengancam NKRI.

Kedua, kecemasan terhadap IS/ISIS ini muncul karena di Indonesia mereka sudah punya relatif cukup banyak pengikut. Kita bisa lihat saat bulan Ramadhan lalu (2014) terjadi aksi *bai'at* (janji setia) kesetiaan kepada IS di berbagai kota seperti di Tangerang, Bekasi, Solo, Malang, Ujung Pandang, Ambon dan lain-lain. Diperkirakan sudah lebih dari 2000 orang yang berbaiat kepada IS/ISIS. Dikhawatirkan ke depan makin banyak yang mendukung IS/ISIS.

Sebagai pakar, Anda juga berinteraksi dengan para mantan pelaku yang sudah melewati/sedang menjalani masa hukuman. Apa yang bisa Anda ceritakan mengenai para pelaku ini?

Sebagian pelaku atau mantan pelaku yang saya ketahui bisa dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, yang masih radikal, mereka-mereka ini tak menyesali apa yang sudah diperbuat. Mereka masih yakin bahwa tindakan teror yang dilakukan memang sesuai dengan tuntutan syariat. Mereka yang radikal ini ketika di dalam penjara juga rata-rata non kooperatif, misalnya mereka tak mau ikut program pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Mereka bahkan tak mau shalat di masjid yang ada di Lapas karena memandang masjid itu masuk dalam kategori masjid *dhirar* (masjid yang dibangun oleh kaum munafik pada masa Nabi Muhammad SAW), alias masjid yang *bathil* karena dibangun oleh *thaghut* dan haram hukumnya shalat disana. (Bersambung ke halaman 4)

(Lanjutan dari halaman 3)

Kedua, mereka yang sudah *disengagement* (proses pelepasan dari kelompok). Mereka adalah orang-orang yang untuk sementara tidak lagi mendukung kekerasan. Namun sifatnya sementara, mereka sangat memperhitungkan situasi dan kondisi serta manfaat dan *mudharat* dari aksi-aksi terorisme. Umumnya mereka memandang bahwa saat ini bukan saat yang baik untuk melakukan aksi teror karena lebih banyak *mudharatnya* ketimbang manfaatnya. Mereka yang sudah terlepas dari kelompoknya ini rata-rata kooperatif. Kalau di penjara mereka mau ikut pembinaan, mau ikut shalat di masjid milik Lapas dan lain-lain.

Mereka yang sudah terlepas dari kelompoknya ini rata-rata kooperatif. Kalau di penjara mereka mau ikut pembinaan, mau ikut shalat di masjid milik Lapas dan lain-lain.

Ketiga, orang yang telah bertobat. Dia meninggalkan paham kekerasan yang sebelumnya mereka anut. Orang-orang seperti ini jumlahnya tidak banyak. Ada sebagian dari mereka yang sekarang juga aktif melawan terorisme. Proses pertobatan itu biasanya terjadi setelah mereka melakukan pengkajian

kembali paham-paham mereka, setelah itu mereka mengkritisi paham tersebut dan kemudian pandangannya jadi berubah. Namun biasanya tak hanya revisi atas paham mereka saja, tapi juga mereka berdiskusi dengan orang-orang terdekat seperti keluarga yang tidak menyetujui mereka terlibat kasus teror. Selain itu juga ada yang makin yakin mereka harus bertobat setelah bertemu dengan para korban, terutama korban Muslim. Mereka mulai mempertanyakan kembali paham mereka apakah benar mereka membela umat Islam, *kok* yang terjadi malah korbannya orang Islam sendiri. Proses perubahan ini saya kira perlu diteliti lagi lebih jauh agar kita bisa menemukan pola moderasi yang terjadi.

Sebagai pakar, apa seruan/himbauan Anda bagi komunitas korban dalam hal mengambil peran sebagai agents of peace (agen-agen perdamaian) dalam masyarakat

Indonesia sekarang ini?

Saya kira posisi korban sebagai agen perdamaian mempunyai peran yang sangat penting. Kenapa? Merekalah orang yang paling punya otoritas dalam memberikan kesaksian bahwa jalan kekerasan bukan sebuah solusi.

Penderitaan mereka sebagai korban adalah sebuah narasi yang sangat kuat, bukan hanya buat masyarakat tapi juga bahkan buat para pelaku. Saya pernah ketemu dengan mantan pelaku yang stres bertemu dengan korban yang Muslim, yang hidupnya menjadi begitu menderita akibat menjadi korban bom.

Si mantan pelaku mengaku stres karena tak pernah membayangkan bahwa kekerasan yang dilakukan menyebabkan sesama Muslim ikut menderita. Selain itu dia stres karena dia ingat apa yang disebut sebagai dosa *jariyah*, dosa yang terus berkepanjangan selama si korban hidupnya menderita.

Ilustrasinya bila ada korban

yang hidupnya jadi berantakan dan juga kehidupan ekonomi keluarganya pun ikut berantakan hingga ada anggota keluarga si korban terlibat dalam berbagai tindakan kriminal, misalkan jadi penjual narkoba karena harus menghidupi keluarganya, maka dalam konsep dosa *jariyah* selama si orang tersebut jadi penjual narkoba, akan turut ditanggung si pelaku yang telah membuat kehidupan korban (termasuk kehidupan ekonomi keluarganya) berantakan. Tak hanya itu, semakin banyak orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut maka semakin banyak dosa yang harus ditanggung oleh si pelaku tersebut.

Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa betapa kuatnya narasi para korban. Karenanya buat saya para korban adalah agen perdamaian yang paling kuat dan tak boleh diabaikan jika kita menginginkan berkurangnya kekerasan di Indonesia. (JC)

GALERI FOTO



Foto Perwakilan AIDA dan korban berfoto bersama dalam acara peringatan 11 tahun Bom Marriott I.

Doc. AIDA



Foto Nanda, salah satu korban Bom Kuningan memaparkan kisahnya pada pembukaan FGD di Royal Kuningan Hotel, Jakarta.

Doc. AIDA

DONASI AIDA

Untuk program perdamaian dan kemanusiaan, AIDA menerima donasi secara tidak mengikat dari semua pihak yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Silahkan salurkan donasi Anda melalui alamat rekening berikut:

Nama: Yayasan Aliansi Indonesia Damai

No. Rekening : 0701745272

Swift Code: BBBAIDJA

Alamat: PermataBank cabang Sudirman WTC II Ground Floor

Jl. Jendral Sudirman kav 29-31 Jakarta 12920

Mencapai Maaf Itu Butuh Proses

Oleh Hayati Eka Laksmi *

Memaafkan itu tak mudah, tapi juga tidak sulit. Hanya butuh proses.

Itulah kata hatiku. Bagaimana tidak? Sejak anak-anak menjadi yatim akibat kejadian itu (Bom Bali 2002-Red.), tidak mudah bagiku untuk memaafkan mereka yang telah tega melakukannya dan dengan tidak berperikemanusiaan, sehingga aku tak mampu berkata apa-apa pada anak-anak.

Sungguh sebuah kejadian yang takkan pernah hilang dari ingatanku sampai kapan pun jua. Ibarat kaset yang sudah terekam sedemikian dalamnya di memori otakku.

Pertumbuhan dan perkembangan kedua buah hatiku mengiringi waktu yang kian menjadi jawaban dan hikmah di balik tragedi tersebut. Banyak yang bisa dimengerti, tapi banyak pula yang tidak bisa kupahami. Sakit, sedih, susah, senang, tawa, semua seakan mengiringi langkah-langkah kecil yang mulai bangkit untuk mencari hidup yang sudah tidak nyaman lagi. Bukan hal yang mudah, berjalan sendiri dengan luka hati, rasa trauma, dan membawa amanah membesarkan anak-anak titipan Ilahi. Dan menyadari bahwa semua adalah kehendak sang Pencipta. Butuh waktu dan bekal iman.

Semua kujalani dengan perjuangan yang tidak mudah, pergulatan batin antara hidup



Foto Ibu Hayati Eka Laksmi menyampaikan presentasi di hadapan siswa-siswi SMKN II Klaten, Jawa Tengah (2013)

dan tidak. Tapi kenyataannya kami masih hidup dan butuh memperjuangkan hidup. Karena hidup itu pilihan. Masih ada anak-anak yg menjadi titipan Allah yang harus diperjuangkan untuk hidup nyaman dan aman. Mereka butuh seorang figur yang kuat dan tabah walau hanya seorang ibu yang hidup sebagai *single parent* setelah ayah mereka tiada. Pijar-pijar inilah yang membuat semangat untuk suatu proses pemahaman hidup untuk bisa berdiri tegak, untuk memaafkan, itu belum. Ternyata sakit untuk memulainya.

Munafik bila seseorang mengatakan begitu mudah memaafkan mereka yang telah memporak-porandakan kehidupan keluarganya. Untuk sampai mencapai maaf itu butuh proses, dimana penguatan diri akan kesadaran iman bahwa

hidup dan mati seseorang sudah ada yang mengaturnya, yaitu Sang Pencipta. Semua akan kembali kepada-Nya, dengan caranya masing-masing. Allah sedang mengingatkan saya dengan cara-Nya dan saya pun berharap Allah sedang menaikkan derajat kami di akhir zaman nanti. Amin.

Berkumpul dengan orang-orang saleh mengingatkan saya untuk sabar dalam ujian hidup, semakin dekat kepada-Nya, semakin belajar untuk bisa menerima takdir yang telah Allah tetapkan, membuat hati semakin tenang, tidak lagi menyalahkan siapa pelaku dan apa yang mereka perbuat. Proses memaafkan pun mulai muncul, hati mulai tenang dan mulai bersabar: bahwa pertolongan pasti akan datang pada saat-saat sulit itu. Hal ini pun mulai tampak pada kehidupan, mulai

bisa menata diri dan keluarga, anak-anak dan pekerjaan. Karena manfaat pada diri mulai terasa, proses memaafkan mulai kuat. Kebencian, dendam dan kemarahan tidak membuat diri tenang dan sabar, justru sebaliknya, hidup terasa seperti penuh amarah dan dengki. Hal-hal itu akan justru membuat semua semakin buruk, secara emosional, sosial maupun finansial. Membuat kita tidak mampu berkonsentrasi dalam bekerja, dan mengganggu lingkungan sosial kita.

Satu hal yang membuat proses memaafkan itu melemah adalah amarah, dengki, dendam yang tidak akan membuat “dia” yang sudah tiada itu hidup kembali. Kita justru akan merusak diri kita sendiri.

Semua telah berlalu, tak perlu larut dalam kesedihan dan kemarahan. Maafkanlah, kita akan dibuat lega karenanya. Kita akan menjadi *legowo* dan ringan melangkah bersama orang-orang yang kita cintai, termasuk mereka yang telah tiada.

Semua butuh proses. Cepat atau lambat, diri sendirilah yang bisa menentukan. Mau cepat bangkit atau terus terpuruk? *Lopyu*, Imawan Sardjono (Alm.)

* Penulis adalah Mama Alif-Aldi, istri almarhum Imawan Sardjono, salah satu korban meninggal Bom Bali 2002.

SUARA PERDAMAIAN

Pelindung: Prof Dr. Syafii Maarif

Dewan Redaksi Senior: Imam Prasodjo, Farha Ciciek Assegaf, Solahudin, Max Boon

Pemimpin Redaksi: Juke Carolina. **Redaktur Pelaksana:** Kartika Sari. **Sekretaris Redaksi dan Layout:** Intan Ryzki Dewi. **Editor:** Hasibullah Satrawi

Redaksi menerima tulisan dari teman-teman korban bom terorisme secara sukarela. Tulisan yang diterima oleh redaksi akan diedit dan disesuaikan, tanpa mengubah substansi yang ada. Tulisan dapat dikirim ke alamat email: sekretariat@aida.or.id.

DARI KORBAN MENJADI PENYINTAS*

Oleh Hasibullah Satrawi **

Apakah yang kurang dari upaya penanganan dan pencegahan terorisme di republik ini? Itulah pertanyaan yang belakangan banyak ditemukan di ruang-ruang publik. Setidaknya berdasarkan pengalaman sempit penulis mengenai beberapa acara terkait dengan persoalan terorisme mutakhir.

Pertanyaan seperti di atas muncul karena di satu sisi, aparat dan lembaga terkait terorisme tampak telah melakukan pelbagai macam kegiatan pencegahan bahkan juga penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan jaringan terorisme. Tapi di sisi lain, jaringan terorisme seakan tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan antiterorisme yang ada. Bahkan jaringan terorisme justru semakin liar dan acap tak terkendali.

Kontroversi penyebaran gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS/ISIL/IS) di negeri ini menjadi salah satu contoh mutakhir terkait dengan “kekebalan” jaringan terorisme dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Tak seperti kelompok teroris yang kerap melakukan gerakan bawah tanah dengan identitas yang tertutup rapat, ISIS bahkan sempat tampil melakukan deklarasi di mana-mana dan melakukan kampanye visual dengan muka yang terbuka!

Pemberdayaan korban

Harus diakui bersama, selama ini ada satu elemen yang kurang diberdayakan dan diberikan peran secara optimal dalam upaya menghadapi ancaman terorisme. Yaitu komunitas-komunitas korban bom terorisme. Kalaupun ada sebagian dari korban yang dilibatkan, hal itu lebih bersifat personal dan cenderung “itu-itu saja”.

Padaحال korban terorisme di negeri ini berjumlah ratusan orang dan tersebar di banyak komunitas. Sebagai contoh, saat ini ada sekitar 200-an korban bom yang masuk dalam *database* Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dan sudah diverifikasi. Di luar sana, masih banyak lagi korban bom yang masih dalam tahapan verifikasi.

Secara teori, masing-masing korban mempunyai potensi yang sama untuk menyadarkan semua pihak terkait dampak aksi terorisme. Mengingat mereka menjadi korban dari kejahatan yang kurang lebih sama.

Oleh karenanya, sejatinya bangsa ini mempunyai ratusan “pasukan perdamaian” untuk menghadapi ancaman terorisme di pelbagai macam bentuknya. Sangat disayangkan, pasukan ini acap terabaikan. Dan hanya segelintir

dari mereka yang diberdayakan untuk menyadarkan masyarakat luas terkait dampak terorisme.

Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan secara bersama-sama ke depan untuk mengoptimalkan peran korban terorisme. *Pertama*, memberdayakan para korban, baik secara mental, semangat maupun wawasan, termasuk membekali mereka dengan teknik-teknik komunikasi dan presentasi.

Pemberdayaan seperti di atas teramat sangat penting untuk dilakukan. Di satu sisi, karena para korban mempunyai pengalaman dan kisah yang akan sangat strategis bila digunakan untuk menyadarkan semua pihak dari ancaman terorisme. Khususnya para korban yang sudah bisa “berdamai” dengan tragedi yang dialami atau bahkan sampai pada tahap memaafkan para pelaku terorisme.

Di sisi lain, karena para korban terdiri dari latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan profesi yang berbeda-beda. Bagi para korban dari kalangan aktivis, contohnya, berbicara di ruang publik sebagai narasumber mungkin tidak menjadi persoalan. Tapi kondisi ini akan sangat berbeda dengan para korban yang sebelumnya tidak biasa berbicara di ruang publik dan formal. Ditambah lagi mungkin sebagian dari korban ada yang masih bermasalah secara psikis akibat tragedi yang dialami.

Oleh karenanya, pemberdayaan para korban dimaksudkan untuk membekali mereka dengan teknik-teknik komunikasi dan presentasi. Hingga para korban mempunyai kemampuan yang sama untuk mengambil peranan strategis dalam upaya menghadapi ancaman terorisme melalui kisah-kisah mereka.

Pada akhir tahun 2013 lalu, AIDA pernah melakukan pemberdayaan seperti di atas. Para korban diberikan pelatihan khusus terkait teknik komunikasi dan presentasi sebelum mereka membagikan kisahnya kepada anak-anak siswa di sejumlah sekolah. Sebagian dari mereka ada yang dari latar belakang aktivis, ibu rumah tangga, buruh bangunan dan juru parkir. Pada tahap selanjutnya para korban diberi kesempatan sebagai narasumber untuk membagikan kisahnya kepada para siswa.

Hasilnya sangat menggembirakan dan sungguh luar biasa; para korban yang awalnya tidak biasa berbicara di depan umum sebagai narasumber secara perlahan mulai terbiasa. Bahkan presentasi para korban dari latar belakang yang berbeda-beda seperti di atas mempunyai kekhasan tersendiri yang tak dapat

dihakimi oleh pemilihan diksi dan struktur pembahasan terkait “pembicara yang baik” secara intelektual. Karena bahasa tubuh mereka yang natural tak jarang mampu memberikan pesan yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami.

Hal ini terlihat jelas dari kesaksian sebagian siswa pasca-acara berlangsung. Sejumlah siswa mengatakan bahwa mereka baru menyadari kesalahan para teroris setelah bertemu dan mendengar langsung kisah yang diberikan oleh para korban. Padahal sebelum mendengarkan presentasi para korban, sebagian siswa mengaku memaklumi apa yang dilakukan oleh para teroris sebagai balasan atas ketidakadilan global terhadap umat Islam.

Namun setelah bertemu dan mendengar kisah korban secara langsung, logika “ketidakadilan (global) yang dibalas dengan ketidakadilan (terorisme)” ini tidak bisa dibenarkan. Mengingat yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak terkait dengan tata-politik global. Bahkan di antara para korban mayoritas memeluk agama yang sama dengan agama para pelaku terorisme.

Kedua, memenuhi hak-hak korban. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, negara berkewajiban melindungi warganya dan mencukupi kebutuhan mereka yang tidak mampu. Terlebih lagi bagi warga negara yang menjadi korban aksi kejahatan seperti terorisme.

Namun demikian, sejauh ini para korban terorisme acap tidak mendapatkan hak-haknya. Bahkan menurut pengakuan dari sebagian korban, pada waktu kejadian bom, tak sedikit dari mereka yang harus menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan layanan medis karena menunggu jaminan pembiayaan dari pemerintah.

Dalam konteks seperti ini, pengesahan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sebuah keterdesakan yang semestinya mendapatkan dukungan dari semua pihak. RUU ini menjamin adanya bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban terorisme dan korban pelanggaran HAM berat (Pasal 6).

Tentu RUU ini tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah yang harus dihadapi oleh para korban terorisme, termasuk pemenuhan hak-haknya. Namun demikian, RUU ini setidaknya bisa memberikan jaminan medis bagi para korban, khususnya pada saat-saat baru

terjadi sebuah ledakan bom. Hingga tidak perlu ada korban bom lagi yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan layanan medis.

Menjadi penyintas

Pemberdayaan dan pemenuhan hak korban sebagaimana di atas menjadi sebuah keharusan untuk mendorong para korban menjadi penyintas. Hingga para korban dapat secara optimal berperan (dan bisa diperankan) dalam upaya menghadapi persoalan terorisme ke depan.

Meminjam kaidah hukum Islam yang sangat kesohor, *faqidus syai'i la yu'thihi* (orang yang tidak memiliki sesuatu tak mungkin bisa memberikan sesuatu tersebut kepada pihak lain). Kaidah hukum ini sedikit banyak relevan dengan sejumlah persoalan internal korban yang ada saat ini. Selama persoalan internal yang ada belum terselesaikan, hampir mustahil mereka dapat berperan secara optimal dalam upaya menghadapi ancaman terorisme.

Semua ini tentu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, khususnya pemerintah. Hingga para korban tidak terlalu disibukkan dengan persoalan “internal” mereka. Dengan demikian, para korban bisa melangkah maju keluar untuk mengambil peranan dalam upaya membangun Indonesia yang damai dari terorisme.

Keterlibatan para penyintas dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan teramat sangat penting. Selain karena korban bisa membagikan kisahnya, sebagaimana di atas, juga karena jaringan terorisme seakan tidak pernah mau hengkang dari bumi Indonesia. Bahkan jaringan ini semakin intens menjadikan anak-anak muda sebagai target regenerasi.

Para penyintas bisa menjadi “pasukan alternatif” dalam perang panjang melawan jaringan terorisme, khususnya di saat negara seakan mati kutu dalam menghadapi jaringan kejahatan ini. Dengan keterlibatan dan peran dari para penyintas, bangsa ini diharapkan mampu memukul mundur sekaligus mengusir terorisme keluar dari teritori Indonesia. Bukan justru Indonesia yang terus terdesak oleh ancaman terorisme di pelbagai macam bentuk dan kelompoknya!

**Tulisan ini pernah dimuat di harian Media Indonesia, Edisi 06 September 2014*

***Penulis adalah Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Jakarta.*